

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, sampah masih menjadi polemik di berbagai daerah. Semakin tinggi tingkat urbanisasi di suatu daerah akhirnya membawa konsekuensi terhadap jumlah sampah padat maupun cair akibat dari pertumbuhan penduduk. Sejalan dengan hal tersebut, Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah yang memiliki wilayah strategis, kini mengalami pertumbuhan yang pesat termasuk terkait permasalahan sampahnya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia sehari-hari melalui proses alam dan berbentuk padat. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dijelaskan bahwa sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga diantaranya yakni sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat berpotensi besar menimbulkan permasalahan dan menjadi sumber penyakit serta membuat lingkungan menjadi kotor. Menurut Kahfi (2017) kegiatan pembakaran sampah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara, memicu terjadinya pemanasan global, serta menimbulkan pencemaran air melalui cairan yang dikeluarkan dari hasil pembakaran yang meresap kedalam tanah. Upaya mengurangi jumlah timbunan sampah dilakukan dengan penerapan sistem pengelolaan

sampah terpadu melalui TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) atau TPS 3R (Reduce, Recycle, Reuse) yang ada di setiap kecamatan oleh Pemerintahan Kota Semarang (Kustyardhi, et al., 2008). Tujuan selain bertujuan untuk mengurangi volume timbulan sampah, sistem pengelolaan ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan.

Sistem pengelolaan sampah selaras dengan empat regulasi yang menjadi dasar Pengelolaan Sampah di Semarang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Penanganan sampah yang tidak baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Bagi masyarakat, sampah dapat membahayakan kesehatan mereka dan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diare, cacangan, dan jamur. Bagi lingkungan sekitar, bau busuk dari sampah sendiri dapat merusak lingkungan yang ada. Masyarakat umum masih bertumpu pada cara tradisional dengan membuang ke tempat pemrosesan akhir dalam pengelolaan sampah. Pandangan masyarakat terhadap sampah masih tradisional dimana masyarakat masih menganggap sampah hanya sebagai barang yang tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan. Mengatasi persoalan tersebut,

diadakan adanya kegiatan pemberdayaan agar masyarakat mampu mengelola sampah mereka dengan baik dengan melalui program Bank Sampah.

Program Bank Sampah menjadi salah satu contoh program pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah untuk mengurangi jumlah timbunan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa masyarakat memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup dalam mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 97 Tahun 2012, Bank Sampah merupakan tempat dalam memilah dan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali serta memiliki nilai ekonomis. Program Bank Sampah merupakan program yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan atau pemilahan sampah dimana dalam program ini menganut sistem bank pada umumnya. Sekarang ini, bank sampah menjadi satu wadah yang digunakan oleh banyak pihak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup yang lebih bersih dan sehat. Peran bank sampah dalam pengelolaan sampah mandiri menjadi sangat penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang bersih. Kini masyarakat dapat secara mandiri memilah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali serta membuat masyarakat menjadi mandiri, meningkatkan skill dan pengetahuan mereka melalui program Bank Sampah (Romadoni, Tahyuddin & Husin, 2018:38). Dalam mengurangi potensi pencemaran lingkungan adanya sistem pengelolaan sampah mandiri memiliki dampak yang besar pada prosesnya (Iswanto, dkk., 2016:186). Bank sampah memiliki peran dalam meningkatkan

ekonomi meskipun belum sebanding nilainya dengan pengembangan bahan produksi lainnya.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dalam bank sampah salah satunya adalah karena program pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah ini sering dianggap bukan program pemberdayaan dari pemerintah, namun dianggap sebagai program pemberdayaan yang diadakan secara swadaya oleh organisasi non pemerintah. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman dikalangan masyarakat yang menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi minim dan mengakibatkan pengelolaan sampah menjadi terkendala dan gagal. Hal itulah yang menjadi alasan mendesak dalam mengadakan perbaikan terhadap tata kelola sampah agar menciptakan lingkungan yang indah dan bersih serta bebas dari penyakit.

Permasalahan Bank Sampah pada umumnya, terdiri dari masih sulitnya mengajak masyarakat dalam mengumpulkan dan menyetor sampah mereka di bank sampah yang dikelola, mereka beranggapan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak sebanding dengan cara pengelolaan sampah mereka dan belum adanya pengelolaan secara profesional. Bank sampah pada umumnya dipegang oleh individu secara sukarela, terutama oleh ibu rumah tangga, yang bukan merupakan orang yang ahli maupun professional di bidang persampahan. Permasalahan lainnya yakni karena hasil dari bank sampah sebanding dengan biaya operasional untuk lokasi bank sampah tersebut, akibatnya mereka lebih memilih untuk berhenti mengelola bank sampah.

Tabel 1.1

Neraca Pengelolaan Sampah Kota Semarang 2019

	KETERANGAN	Tahun 2018	Tahun 2019
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	456.873	466.011
ii	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH <i>Persentase pengurangan sampah</i>	68.196,75 14,33%	82.280,65 17,65%
a	Pembatasan timbulan sampah	39.018,65	53.052,85
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	21.757,65	21.757,65
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	7.420,45	7.420,45
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH <i>Persentase penanganan sampah</i>	317.367,50 69,47%	361.834,50 77,64%
d	Pemilahan/Pengumpulan		
e	Pengangkutan Sampah diangkut ke pengelola sampah Sampah diangkat ke tempat pemrosesan akhir		
f	Pengolahan Sampah terolah menjadi bahan baku Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	16.425,00 16.425,00 0	51.574,50 15.074,50 38.500,00
g	Pemrosesan akhir Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	300.942,50 300.942,50	310.250,00 310.250,00
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II+III) <i>Persentase sampah terkelola</i>	385.564,25 84,39%	444.055,35 95,29%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I-IV) <i>Persentase sampah tidak dikelola</i>	71.309 15,61%	21.955 4,71%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Laporan Hasil Pelaksanaan Jakstrada 2

Berdasarkan JAKSTRADA, dapat diketahui bahwa masih ada sampah yang tidak dikelola. Timbulan sampah per kapita dapat diketahui bahwa tingkat produksi sampah per kapita yang diterapkan adalah 0,70 kg/orang/hari, untuk membuat perkiraan tingkat produksi sampah di Kota Semarang. Timbulan sampah dari sumber non-rumah tangga adalah 365 ton per hari, sehingga dapat diasumsikan bahwa sisa sampah 862 ton per hari dihasilkan dari sumber rumah tangga. Ini setara dengan rasio persentase 70%:30% untuk produksi sampah rumah tangga dan non-rumah tangga. Untuk itu, penanganan sampah khususnya sampah rumah tangga perlu perhatian besar. Optimalisasi bank sampah dengan menyediakan ekosistem bagi Bank Sampah, mencari pemasok sampah, dan pembeli regular produk yang dihasilkan menjadi tugas masyarakat agar tercipta lingkungan yang bebas dari timbulan sampah.

Di Semarang, terdapat empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dioperasikan dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Semarang. Setiap UPT terdiri dari 4 kecamatan. Adapun pembagian UPT per kecamatan adalah sebagai berikut : UPT I memiliki cakupan wilayah meliputi kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Gajah Mungkur. UPT II memiliki wilayah cakupan meliputi kecamatan Pedurungan, Semarang Timur, Gayamsari, Genuk. UPT III memiliki wilayah cakupan meliputi kecamatan Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang. Sementara UPT IV memiliki wilayah cakupan meliputi Tugu, Ngaliyan Mijen, Semarang Barat.

Tabel 1.2

Jumlah timbulan sampah di masing-masing UPT

UPT	Jumlah Timbulan Sampah
UPT I	232
UPT II	302
UPT III	347
UPT IV	346

Sumber : Waste Upstream Study, KIAT-PwC,2019 (Buku Putih Bappeda Kota Semarang, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa UPT III merupakan UPT yang memiliki timbulan sampah paling banyak di kota Semarang. UPT III juga merupakan UPT yang cakupan wilayahnya salah satunya adalah Kecamatan Banyumanik. Melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, dihasilkan fakta bahwa jarak kecamatan terjauh dengan TPA Jatibarang adalah Kecamatan Banyumanik dengan jarak sejauh 30 KM. Pengelolaan sampah di Kecamatan Banyumanik ini tentunya menjadi sorotan dan perlu perhatian khusus. Karena dengan menghasilkan jumlah sampah yang tinggi dan jarak yang jauh dengan TPA, tentu akan mempengaruhi jumlah tumpukan sampah yang akan menyebabkan wajah Kota Semarang yang tidak bersih, tidak rapi dan tidak sehat.

Menariknya, salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Banyumanik yakni Kelurahan Sronдол hanya memiliki satu bank sampah yang hingga saat ini masih eksis. Bank Sampah tersebut berada di wilayah Brigif, Sronдол Kulon dengan nama Bank Sampah Resik

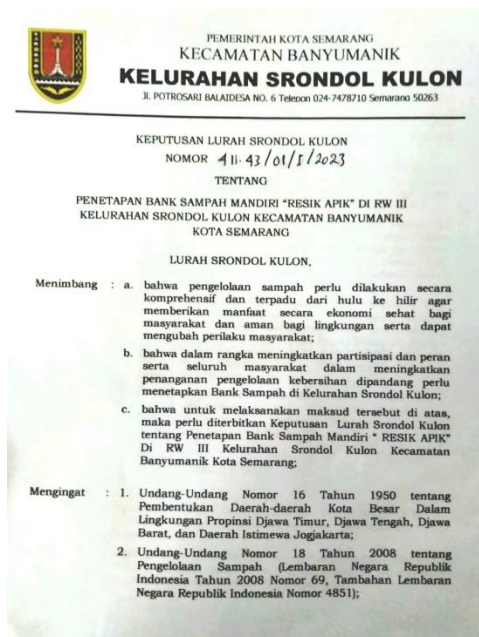
Apik. Bank Sampah Resik Apik adalah upaya pemerintah kota dalam memberdayakan masyarakat guna penanganan sampah di wilayah Srandol Kulon. Kegiatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik Apik pada umumnya dilakukan dengan memisahkan antara sampah organik dan anorganik kemudian membawanya ke tempat penampungan sementara (Bank Sampah Resik Apik).

Bank Sampah Resik Apik memiliki sistem yang sama seperti bank pada umumnya, yakni sistem menabung. Sistem yang ditetapkan ini diberi nama tabungan sampah, dimana masyarakat sekitar yang menabungkan sampahnya di bank sampah, nantinya akan dikonversikan menjadi uang sesuai dengan jumlah sampah yang ia berikan. Tujuan utama dari menabung sampah ini adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dengan mengurangi volume sampah khususnya sampah non-organik pada kegiatan rumah tangga. Bank sampah ini juga melakukan daur ulang sampah agar menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.

Bank Sampah Resik Apik telah berdiri dari tahun 2015. Terhitung delapan tahun telah berdiri bukan merupakan waktu yang singkat bagi Bank Sampah. Bank Sampah Resik Apik pun juga telah memiliki Surat Keterangan (SK) mengenai penetapan Bank Sampah Resik Apik di RW III Kelurahan Srandol Kulon Semarang.

Gambar 1.1

SK Penetapan Bank Sampah Resik Apik oleh Kelurahan Spondol Kulon



Sumber : Peneliti, 22 Maret 2023

Berdasarkan SK Penetapan Bank Sampah Resik Apik oleh Kelurahan Spondol Kulon, penetapan Bank Sampah Resik Apik sebagai Bank Sampah yang secara resmi berdiri dan diakui oleh Kelurahan Spondol Kulon baru ditetapkan pada 2023. Hal ini baru dilakukan setelah sekian lama Bank Sampah berdiri. Meskipun telah memiliki SK, pengelolaan Bank Sampah Resik Apik belum memiliki perkembangan yang baik. Dibuktikan dengan jumlah sampah masuk setiap tahunnya yang stagnan bahkan cenderung menurun.

Tabel 1.3

Jumlah Sampah Masuk tahun 2017-2022

No	Jenis	Jumlah Sampah Masuk				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kardus	360 kg	352 kg	350 kg	350 kg	330 kg
2	Plastik	120 kg	120 kg	115 kg	110 kg	100 kg
3	Margin	180 kg	160 kg	153 kg	147 kg	135 kg
Total		660 kg	632 kg	618 kg	607 kg	565 kg

Sumber : Data Bank Sampah Resik Apik

Berdasarkan tabel mengenai jumlah sampah masuk Bank Sampah Resik Apik, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah sampah masuk setiap tahunnya. Tidak hanya satu tahun, namun selama lima tahun terakhir, tidak ada peningkatan jumlah sampah masuk. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya promosi dan koordinasi dengan masyarakat, dalam hal ini pengelola tidak merangkul masyarakat brigif untuk mau berpartisipasi. Kurangnya promosi dan koordinasi dengan masyarakatnya ini menimbulkan kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi. Partisipasi yang rendah akan menimbulkan pemberdayaan yang juga rendah atau tidak berjalan dengan maksimal.

Adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menyetorkan sampah ke Bank sampah adalah salah satu kunci dari keberjalanan Bank Sampah Resik Apik. Adanya program bank sampah di wilayah Brigif sebenarnya dapat dijadikan sebagai peluang untuk menambah pendapatan, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kreativitas. Sebaliknya, peluang tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat brigif.

Setelah delapan tahun berdiri, hingga saat ini Bank Sampah Resik Apik belum berhasil mendapatkan prestasi dari kejuaraan atau perlombaan berbasis lingkungan. Bank Sampah Resik Apik juga mengalami penurunan jumlah pemasukan sampah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Sampah Resik Apik belum berkembang setelah berdiri bertahun-tahun dan setelah di akui oleh Kelurahan Srandol Kulon sebagai Bank Sampah resmi yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan belum berkembangnya Bank Sampah Resik Apik pastinya terjadi karena kurangnya promosi dan koordinasi kepada masyarakat, dimana pengelola kurang dalam merangkul masyarakat brigif, sehingga hal tersebut memperngaruhi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat Bank Sampah Resik Apik. Seperti yang telah diketahui, kunci keberhasilan dari pemberdayaan adalah partisipasi masyarakat. Kurangnya partisipasi tentunya mempengaruhi pemberdayaan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang ada pada Bank Sampah Resik Apik Kelurahan Srandol Kulon.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bank Sampah Resik Apik belum berkembang, dilihat dari penurunan jumlah sampah masuk dan tidak adanya prestasi yang dimiliki.

2. Pengelola Bank Sampah masih minim dalam hal promosi dan koordinasi kepada masyarakat, menimbulkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi rendah.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik telah berdiri sejak lama dan memiliki SK penetapan oleh Kelurahan Srandol Kulon, namun hingga saat ini belum memiliki prestasi.
4. Jumlah sampah masuk pada Bank Sampah Resik Apik semakin menurun dari tahun ke tahun.
5. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah yang sedang berjalan, menimbulkan partisipasi masyarakat yang tidak maksimal.
6. Masyarakat lebih memilih menjual sampah rumah tangganya langsung ke pengepul di bandingkan mengelola dan memanfaatkannya menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat melalui Program Bank Sampah Resik Apik Srandol Kulon?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui Program Bank Sampah Resik Apik Srandol Kulon?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Resik Apik Spondol Kulon.
2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat pada Bank Sampah Resik Apik Spondol Kulon

1.5. Kegunaan penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi pemerintah berupa sumbangan pemikiran bagi pemerintah terkait Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik Kelurahan Spondol Kulon. Selain itu diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat selain Spondol Kulon agar dapat memaksimalkan pelaksanaan program bank sampah di daerahnya. Dan dapat memberikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah Resik Apik Kelurahan Spondol Kulon, Kecamatan Banyumanik sebagai upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

1.5.3 Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi berbagai pihak serta menjadi pedoman di masa mendatang terkait pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah dalam memperbaiki dan mengembangkan Bank Sampah berbasis masyarakat.

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4

No	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1	Dai, S. I. S., & Pakaya, S. I. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dan Pembentukan Bank Sampah di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. <i>Jurnal Ilmiah Pangabdhi</i> , 5(2), 110-118.	Untuk mengatasi persoalan sampah, menumbuhke mbangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah serta meningkatkan nilai ekonomis sampah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Deskriptif Analitik	Kegiatan pengabdian ini berlangsung dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Mitra antusias dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan
2	Dewi, R. A. S., Nursan, M., FR, A. F. U., & Irawan, D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten	Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bank sampah dan meningkatkan keterampilan dan pendapatan masyarakat dalam mengelolabank	Teknik Wawancara	Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan program bank sampah serta program pendirian dan pemberdayaan di Desa Kerongkong telah mampu mengurangi jumlah tumpukan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

No (1)	Peneliti (2)	Tujuan (3)	Metode (4)	Hasil Penelitian (5)
	Lombok Timur. <i>Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA</i> , 5(3), 173-177.	sampah		
3	Putra, W. T. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. <i>Jambur a Journal of Community Empowerment</i> , 69-78.	Untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh pengelola Bank Sampah Panca Daya Kecamatan Kuranji Kota Padang, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal SWOT serta menyusun strategi sebagai rekomendasi keberhasilan bank sampah	Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif.	Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah menggunakan 5 tahapan proses pemberdayaan yaitu, Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.
4	Wartama, I. N. W., & Nandari, N. P. S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan	Mengedukasi terhadap masyarakat mengenai Bank Sampah dimulai dari pendirian	Metode SOS (sort out,saved) meliputi pemilahan sampah, lalu dikumpulkan	Desa Sidakarya merupakan lingkungan yang sudah cukup lama bergelut dengan permasalahan sampah, baik sampah dengan volume tertentu

No (1)	Peneliti (2)	Tujuan (3)	Metode (4)	Hasil Penelitian (5)
	Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah di Desa Sidakarya Denpasar Selatan. <i>Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat</i> , 1(1), 44-48.	hingga mekanisme administrasi.	dan ditabung yang outputnya diharapkan dapat menciptakan lingkungan bebas sampah.	maupun bau kurang sedap yang menjadi polusi udara suatu lingkungan. Pemberdayaan keuntungan dari penyeteran.
5	Hapsari, R. S., Suwasono, E., & Daroini, A. (2020). Bank sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. <i>REV ITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen</i> , 8(2), 226-231.	Untuk mengetahui dampak adanya pemberdayaan masyarakat “Manfaat”, Manajemen pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah “Manfaat”.	Metode kualitatif deskriptif	Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya dampak positif dalam dengan adanya Bank Sampah Manfaat di Desa Bolorejo, hal ini dapat dilihat dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
6	Febtriasari, Z. (2020). <i>Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Bank Sampah Sumber Rezeki: Studi deskriptif di Sukagalih RW 06 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota</i>	Untuk mengetahui, proses dari pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Bank Sampah Sumber Rezeki dan keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat melalui	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	masyarakat RW 06 sukagalih mampu mengatasi masalah lingkungan terkait sampah dengan mendirikan Bank Sampah Sumber Rezeki. Proses pemberdayaan yang dilakukan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola sampah. Selain mengatasi

No (1)	Peneliti (2)	Tujuan (3)	Metode (4)	Hasil Penelitian (5)
	<i>Bandung</i> (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).	pengelolaan sampah di Bank Sampah Sumber Rezeki.		permasalahan lingkungan, pemberdayaan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat RW 06 Sukagalih terkait pengelolaan sampah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah yang bekerjasama mengatasi permasalahan lingkungan yang ada melalui pengelolaan sampah.
7.	Perkasa, D. H., Fathihani, F., & Apriani, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Sampah Di Kelurahan Tanjung Duren. <i>Andhara</i> , 1(2), 19-27.	untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap sampah sehingga bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.	Metode yang Dilakukan Adalah Benchmarking, Yakni Pelatihan Pemilahan sampah, Diskusi dengan tokoh masyarakat, Pelatihan Pengelolaan bank sampah dan sosialisasi Keberadaan bank sampah.	Pemberian materi tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendirian bank sampah dapat terus ditingkatkan, khususnya ibu rumah tangga, serta dapat memberdayakan ibu rumah tangga untuk dapat memilah-milah sampah organik dan sampah anorganik sehingga dapat lebih dimanfaatkan dan dimungkinkan untuk dapat digunakan kembali

Penelitian terdahulu dikaji dan difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dirangkum sebagai pemetaan yang dilakukan dalam penelitian ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Dai dan Pakaya (2019) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dan Pembentukan Bank Sampah Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo” menggunakan metode deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi persoalan sampah, menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah serta meningkatkan nilai ekonomis sampah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini berlangsung dengan baik sesuai yang direncanakan. Mitra antusias dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan. Sejalan dengan penelitian oleh Dai, dan Pakaya, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Irawan (2022) berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur menggunakan metode deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data wawancara, dimana tujuan dari pemberdayaan ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bank sampah dan meningkatkan keterampilan dan pendapatan masyarakat dalam mengelola bank sampah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan program bank sampah serta program pendirian dan pemberdayaan Desa

Kerongkong telah mampu mengurangi jumlah umpukan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Penelitian lainnya adalah mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Panca Daya Kecamatan Kuranji Kota Padang oleh Putra, W.T (2020) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh pengelola Bank Sampah Panca Daya Kecamatan Kuranji Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu: proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah menggunakan 5 tahapan proses pemberdayaan yaitu, Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Berbeda dengan penelitian oleh Putra (2020), penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah di Desa Sidakarya Denpasar Selatan oleh Wartama dan Nandari (2020) menggunakan metode SOS (*sort out, saved*). Temuan menunjukkan bahwa pemilihan bank sampah sebagai salah satu pengelolaan sampah rumah tangga merupakan hal yang tepat karena memiliki nilai sosial dan nilai ekonomis serta dapat menjaga lingkungan rumah tangga agar tetap asri dan sehat.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hapsari, Suwarsono, Daroini (2020) bertujuan untuk mengetahui dampak adanya pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah “Manfaat” dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukkan adanya dampak positif dengan adanya Bank Sampah Manfaat di Desa Bolorejo yang dapat dilihat dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Febtriasari (2020) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Sumber Rezeki (Studi Deskriptif Sukagalih RW 06, Kelurahan Pasirjati, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung” dimana menggunakan metode deskriptif kualitatif dan memiliki tujuan untuk mengetahui, proses dari pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Bank Sampah Sumber Rezeki dan keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Bank Sampah Sumber Rezeki. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat RW 06 sukagalih mampu mengatasi masalah lingkungan terkait sampah dengan mendirikan Bank Sampah Sumber Rezeki. Proses pemberdayaan yang dilakukan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola sampah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Perkasa, Fathilani, Apriani (2021) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Sampah di Kelurahan Tanjung Duren” bertujuan untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap sampah sehingga bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan lingkungan menggunakan metode Benchmarking, yakni pelatihan pemilahan sampah, diskusi dengan tokoh masyarakat, pelatihan pengelolaan bank sampah dan sosialisasi keberadaan bank sampah. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian materi tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendirian bank sampah dapat terus ditingkatkan, khususnya ibu rumah tangga, serta dapat memberdayakan ibu rumah tangga untuk dapat memilah-milih sampah organik dan sampah anorganik sehingga dapat lebih dimanfaatkan dan dimungkinkan untuk dapat digunakan kembali.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu pada tabel. Persamaan terdapat pada fokus penelitian adalah pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah. Sementara perbedaan penelitian tersebut adalah pada beberapa metode yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan metode *Benchmarking* ataupun SOS, sementara pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokus penelitian penelitian ini dengan penelitian terdahulu pun berbeda. Dimana lokus penelitian ini adalah pada Bank Sampah Resik Apik, Kelurahan Sronдол Kulon, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Kebermanfaatan dari penelitian-penelitian terdahulu ialah sebagai tolak ukur peneliti dalam menulis dan menganalisis suatu penelitian, serta untuk mengetahui langkah penulis benar atau salah. Penelitian dari Febtriasari, Z. (2020) yang berjudul “Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Bank Sampah Sumber Rezeki: Studi deskriptif di Sukagalih RW 06 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung” menjadi penelitian yang paling banyak memberikan referensi kepada penulis.

1.6.2. Administrasi Publik

Penerapan kemampuan dan keterampilan kerja agar mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional yang dapat terwujud apabila terdapat perencanaan yang realistis, tepat, logis, dan dapat dikerjakan merupakan pengertian dari administrasi (Harbani Pasalong 2007:4). Administrasi publik sebenarnya sudah ada sejak dahulu, hal ini timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi seperti sistem penataan pemerintahan yang sekarang kita kenal dengan sebutan administrasi publik (Toha, 2008:88).

Nicholas Henry (2008:8) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan kombinasi antara teori dan praktik yang bertujuan dalam mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah terhadap hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan untuk mendorong kebijakan public agar responsive terhadap kebutuhan sosial.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan, dapat peneliti simpulkan bahwa Administrasi Publik ialah kombinasi antara teori dan praktik yang mengkoordinasikan sumber daya dan personel publik untuk melaksanakan proses formulasi, implementasi, evaluasi serta mengelola keputusan dalam kebijakan publik secara efektif dan efisien.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (dalam Akib 2009 :3-6) mengungkapkan tahap- tahap berkembangnya ilmu administrasi menjadi beberapa paradigma :

1. Paradigma Dikotomi Politik/Administrasi (1900-1926)

Dalam bukunya *Politics and Administration*, Goodnow menegaskan bahwa politik dan administrasi merupakan dua fungsi Negara beserta organ-organnya. Politik berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara, sedangkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Prinsip-prinsip administrasi diajukan oleh Gulick & Urwick, orang-orang kepercayaan Presiden Franklin Delano Roosevelt. Tujuh prinsip dikenal

dengan akronim POSDCoRB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). Menurut Gulick & Urwick, adanya prinsip-prinsip tersebut membuat organisasi berjalan dengan baik.

3. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Studi administrasi publik ditandai dengan ketiadaan kerangka kerja intelektual, bahkan administrasi publik dianggap sebagai bidang studi yang mengalami kemerosotan spiral.

4. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Pada paradigma 4 ini administrasi publik kehilangan identitas dan keunikannya dalam konteks manajemen yang luas.

5. Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970-Sekarang)

Pada paradig ini, fokus dan lokus sudah jelas. Fokus dalam administrasi publik adalah teori manajemen, teori organisasi, dan teori kebijakan publik. Lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik.

1.6.4. Manajemen Publik

Nor Ghofur (2014) menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan manajemen pemerintah, dimana manajemen publik juga bertujuan dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan terhadap masyarakat. Manajemen Publik menurut Shafritz dan Russel (dalam Keab, 2008:93) didefinisikan sebagai upaya

seseorang dalam bertanggungjawab ketika menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengendalian adalah beberapa fungsi manajemen, menurut Henry Fayol (Safroni, 2012:179). Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi utama (fundamental) manajemen, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian juga harus direncanakan terlebih dahulu..

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian berarti menentukan tugas apa yang harus dilakukan, mengkategorikan tugas dan membaginya kepada setiap karyawan, menciptakan subsistem, dan menetapkan hubungan.

c. Pengarahan (*Commanding*)

Fungsi pengarahan (*commanding*) ialah fungsi yang dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan bisa dimulai.

d. Pengkoordinasian (*Coordinating*)

Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari tugas perusahaan, semua pekerjaan bawahan harus digabungkan, diintegrasikan, dan diarahkan ke tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi manajemen publik. Peneliti simpulkan bahwa manajemen publik adalah studi interdisipliner yang melihat proses perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Manajemen publik pada pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik terlihat pada kegiatan organisasinya. Kegiatan organisasi tersebut tidak lepas dari proses manajemen yang mengatur jalannya kegiatan pengelolaan sampah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam, yang di dalamnya juga telah menerapkan fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling*.

1.6.5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mempersiapkan masyarakat bersama dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan (Sumaryadi, 2005:11). Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat sehingga mereka dapat mewujudkan harkat dan martabat mereka secara optimal untuk bertahan dan berkembang secara mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Widjaja, 2003:169).

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemandirian masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya dengan memaksimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki di dalam masyarakat tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik telah memuat konsep penting yang harus ada dalam pemberdayaan, yaitu kemandirian, dimana masyarakat brigif memiliki inisiatif untuk tetap memberdayakan masyarakat melalui Bank Sampah agar lingkungan tetap terjaga dan dapat meningkatkan perekonomian mereka.

1.6.5.1 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Ruang lingkup pemberdayaan biasanya didasarkan pada bidang-bidang yang sering menjadi objek pemberdayaan masyarakat. Menurut Ndraha (2003), lingkup pemberdayaan masyarakat terdiri dari empat (empat) bidang: (1) politik; (2) ekonomi; (3) sosial budaya; dan (4) lingkungan. Berdasarkan prosesnya, pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan ke dalam tiga (tiga) hal: (1) pra-pemberdayaan, yang berarti menciptakan lingkungan interaksi yang baik sehingga masyarakat merasa percaya diri dan mampu menjadi pelaku pembangunan; (2) pelaksanaan pemberdayaan, yang berarti menciptakan lingkungan yang kondusif untuk interaksi; (3) pasca pemberdayaan, dimaksudkan bahwa lingkup ini memungkinkan masyarakat untuk melanjutkan proses pemberdayaan meskipun pemangku kepentingan lain tidak lagi dapat berpartisipasi karena keterbatasan waktu, anggaran, dan kegiatan.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai ruang lingkup pemberdayaan masyarakat, dapat peneliti simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki ruang lingkup yang mencakup dari 4 (empat) bidang berdasarkan bidangnya yaitu bidang: (1) politik; (2) ekonomi; (3) sosial budaya; dan (4) lingkungan. Berdasarkan prosesnya meliputi (1) pra pemberdayaan; (2) pelaksanaan pemberdayaan; dan (3) pasca pemberdayaan.

1.6.5.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan pendapat Najiyati, dkk (2014), terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

1. Kesetaraan, dimana menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lainnya.
2. Partisipatif, Partisipasi adalah dasar dari pemberdayaan masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat tidak dapat dianggap sebagai pemberdayaan kecuali ada elemen yang memberikan kewenangan atau sebagian dari kekuasaan dan mendorong untuk menjadi lebih berdaya.
3. Keswadayaan, Bantuan atau dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian dalam proses pemberdayaan lebih diutamakan daripada bantuan yang bersifat caritas. Namun, hasil jangka panjang yang menguntungkan tetap lebih penting..

4. Berkelanjutaan, Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang berkelanjutan, terus-menerus, dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat berfokus pada program pembangunan yang terbatas waktu dan dana.

Berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Najiyati, dkk (2014), maka pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik harus mencakup 4 prinsip tersebut yang meliputi keswadayaan, kesetaraan, partisipatif dan berkelanjutan.

1.6.5.3 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Widjajanti (2011:18) menjelaskan keberdayaan masyarakat merupakan adanya daya, kemampuan maupun kekuatan yang dimiliki masyarakat dalam mengidentifikasi potensi serta masalah dalam menentukan pemecahan secara mandiri, yaitu melalui pengukuran dari tiga aspek, diantaranya :

1. Kemampuan dalam pengambilan keputusan
2. Kemandirian
3. Kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

Menurut Widiasih dan Suminar (2015:90), beberapa indikator keberhasilan program termasuk proses yang sesuai dengan rencana, pencapaian tujuan yang sesuai, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, dan kemampuan untuk menjamin kesesuaian proses dan pencapaian tujuan melalui mekanisme kendali yang harmonis dan melekat untuk proses.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:147-152) menjabarkan bahwa terdapat 4 (empat) dimensi guna mengukur pemberdayaan. Keempat indikator tersebut yakni sebagai berikut :

1. Akses, Dimensi ini memiliki arti yaitu masyarakat yang diberdayakan memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukannya untuk mengembangkan diri. Tidak adanya akses berdampak pada pemberdayaan yang menjadi tidak terlaksana.
2. Partisipasi, Dimensi ini terkait keikutsertaan masyarakat pada kegiatan program pemberdayaan sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam setiap keputusan yang diambil.
3. Kontrol, Proses pengamatan atau pengawasan kegiatan secara berkelanjutan agar sesuai rencana. Masyarakat yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai kemampuan mengontrol proses pendayagunaan sumber daya tersebut.
4. Kesejahteraan, Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar manusia.

Dari beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:147-152) untuk mengukur pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik.

1.6.5.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Faktor Pendorong pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013:188) adalah

1. Sumber Daya Alam
2. Sarana dan Prasarana
3. Kebijakan

Faktor Penghambat pemberdayaan masyarakat menurut Arsiyah (2009:379) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya manusia
2. Keterbatasan kemampuan manajerial
3. Tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki

Pada penelitian ini, digunakan teori oleh Mardikanto (2013:188) untuk meneliti faktor pendorong pemberdayaan masyarakat yang meliputi SDA, SDM, keadaan kelembagaan, sarana dan prasarana, kebijakan serta organisasi dan administrasi. Digunakan juga teori oleh Arsiyah (2009:379) untuk mengetahui faktor penghambat pemberdayaan masyarakat yang meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal.

1.6.6 Bank Sampah

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 97 Tahun 2012, Bank Sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Suryani (2014) menjelaskan

bahwa, Bank Sampah didirikan untuk membenahi dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat karena tingkat sampah organik dan anorganik yang semakin meningkat menjadi dan menjadi masalah lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 menambahkan definisi terkait Bank Sampah yang diartikan sebagai tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Menurut Narasihan (2008) Bank sampah adalah bagian daripada adanya konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan. Dimana dalam konsep penerapannya setiap masyarakat sekitar yang menabung memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah sebanding dengan jumlah uang yang dipinjam.

Berdasarkan definisi terkait Bank Sampah menurut para ahli diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa Bank Sampah ialah tempat pengelolaan sampah yang bertujuan 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) atau mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah agar berdaya guna yang dilakukan oleh masyarakat.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Konsep yang digunakan dalam penelitian terkait pemberdayaan masyarakat dalam program bank sampah Resik Apik Sron dol Kulon akan dilihat dari :

1. Akses, yakni kesempatan bagi masyarakat kelurahan spondol kulon khususnya masyarakat brigif terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan, dapat dilihat dari :
 - 1.1. Akses Fisik, yaitu berupa kemudahan dalam mendapatkan sumber daya sampah.
 - 1.2. Akses Non Fisik yaitu berupa minat dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dari masyarakat Spondol Kulon khususnya masyarakat Brigif dalam program bank sampah, yang akan dilihat dari :
 - 2.1 Keikutsertaan masyarakat Brigif dalam pengambilan keputusan
 - 2.2 Keikutsertaan masyarakat Brigif dalam perencanaan kegiatan
 - 2.3 Keikutsertaan masyarakat Brigif dalam pelaksanaan kegiatan
3. Kontrol, adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program bank sampah resik apik berjalan dengan rencana dan tujuan yang dilihat dari:
 - 3.1 Adanya rapat evaluasi setiap pemberdayaan Bank Sampah Resik Apik.
 - 3.2 Kontrol Masyarakat dalam Kegiatan
 - 3.3 Adanya tim pengawas dalam pemberdayaan Bank Sampah Resik Apik.
4. Kesejahteraan, adalah kemampuan masyarakat spondol kulon khususnya masyarakat brigif dalam mencukupi kebutuhan dasarnya, yang dilihat dari:

4.1 Tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan masyarakat brigif.

4.2 Bertambahnya pendapatan

4.3 Kemudahan mengakses fasilitas Kesehatan dan Pendidikan.

Dalam mencapai sebuah keberhasilan pemberdayaan masyarakat pasti terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam keberjalanannya. Faktor pendorong adalah kondisi yang mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, produksi, usaha. Faktor penghambat merupakan hal yang melemahkan suatu kegiatan, usaha, atau produksi. Faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam Bank Sampah Resik Apik diantara lain adalah:

1. Faktor-faktor yang mendorong pemberdayaan masyarakat dalam Bank Sampah Resik Apik yaitu :
 - 1.1 Sumber daya alam, yang dimaksud adalah sampah organik atau sampah yang berasal dari alam, misalnya daun, ranting pohon, kotoran hewan yang bisa dimanfaatkan menjadi barang yang memiliki nilai guna, seperti pupuk kompos.
 - 1.2 Sarana dan prasarana, adalah alat pendukung dalam kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi : kendaraan pick up atau kendaraan pengangkut sampah lainnya, drum untuk membuat kompos, timbangan sampah, etalase untuk menjual hasil daur ulang.
 - 1.3 Regulasi, yang dimaksud regulasi disini adalah peraturan pemerintah ataupun kebijakan terkait pengelolaan sampah yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam Bank Sampah Resik Apik.

2. Faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik yaitu :
 - 2.1 Keterbatasan kemampuan manajerial, yang dimaksud adalah keterbatasan oleh pengurus bank sampah dalam hal mengatur kegiatan. Misalnya adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi, keterbatasan waktu, pengambilan keputusan yang kurang tepat menjadikan kegiatan tidak efektif.
 - 2.2 Tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada. Yang dimaksud adalah kemampuan pengurus bank sampah dalam mencari peluang pasar untuk menjual hasil daur ulang sampah.
 - 2.3 Belum ada pihak swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang dimaksud adalah pihak di luar pemerintah yang memberikan bantuan berupa uang, modal limbah untuk dimanfaatkan, ataupun fasilitas untuk mengelola sampah.

1.8. Argumen Penelitian

Bank sampah saat ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah yang memiliki prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Maksud dari pengelolaan sampah 3 R ini adalah untuk menjadi upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga nya sendiri atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat dengan cara menggunakan Kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah, meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sampah menjadi barang yang berdaya guna yang nantinya akan memberikan pendapatan kepada masyarakat

yang diberdayakan.. Kehadiran program bank sampah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah yang ada di lingkungannya dan dapat mendorong penerapan yang berkelanjutan. Dengan adanya bank sampah, terjadi proses pemilahan sampah yang masih dapat dimanfaatkan ataupun yang masih dapat digunakan yang nantinya akan dijadikan sebuah produk yang berharga. Bank Sampah memiliki dampak positif terhadap lingkungan, karena akan mengurangi jumlah timbulan sampah yang nantinya akan dibuang ke TPA Jatibarang. Apabila program Bank Sampah ini berhasil dilakukan secara efektif dengan bantuan masyarakat di setiap kelurahan, maka pastinya Kota Semarang akan menjadi lebih bersih dan akan mengurangi tumpukan sampah di TPA Jatibarang yang kini sudah hampir penuh. Masyarakat yang menabung sampah pada bank sampah disebut nasabah, dan memiliki buku tabungan. Pada dasarnya sistem bank sampah memiliki system yang serupa dengan bank pada umumnya. Fokus dalam penelitian ini adalah ingin mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada Kelurahan Sronдол Kulon melalui Bank Sampah Resik Apik

1.9. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini menekankan pada analisis secara deskriptif. Metode penelitian kualitatif diterapkan pada kondisi yang sebenarnya terjadi atau secara alamiah (*natural setting*). Metode kualitatif lebih mengupayakan dalam menyelidiki masalah dan lebih fokus pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Metode

penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman aspek terhadap suatu kondisi tertentu untuk melihat permasalahan secara lebih mendalam.

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai suatu fenomena atau topik penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penyusunan penelitian dengan tujuan untuk menciptakan gambaran, deskripsi atau uraian yang sistematis, faktual, akurat tentang faktor, ciri-ciri dan hubungan fenomena yang diteliti. Adapun analisis data-data lapangan yang sudah terkumpul akan dianalisa lebih dalam mengenai pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah Resik Apik Kelurahan Sronдол Kulon.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian diartikan sebagai tempat peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya terjadi pada suatu objek guna memperoleh data dan informasi. Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Sampah Resik Apik. Alasan peneliti memilih Bank Sampah Resik Apik sebagai situs penelitian adalah dikarenakan lokasi tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan topik permasalahan pada penelitian ini, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik. Dimana peneliti akan memerlukan data-data dan wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam program Bank Sampah Resik Apik.

1.9.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yang artinya teknik pengambilan sampel sumber data didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2013:368). Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini yaitu Pengurus Bank Sampah Resik Apik yang terdiri dari (Pembina, ketua, bagian pilah sampah, bagian penimbangan, bagian pencatatan, bagian keterampilan), dan Ketua RW. *Snowball Sampling* digunakan peneliti sebagai teknik pengambilan sampel yang akan diambil dari masyarakat.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bukan bersifat *numeric* atau bukan angka, melainkan kata-kata atau kalimat atau pernyataan (data kualitatif). Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa teks naratif dan kata-kata yang diterjemahkan dari hasil wawancara dengan narasumber dan hasil observasi lingkungan yang telah diamati. Data yang ditemukan meliputi transkrip wawancara, foto, serta dokumen lain yang mampu mendukung aspek data pada penelitian ini.

1.9.5. Sumber Data

Salah satu yang paling penting dalam penelitian adalah sumber data, yang diartikan sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya memberi respons tetapi juga sebagai pemilik informasi. Terdapat 2 sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap pengurus Bank Sampah Resik Apik dan nasabah Bank Sampah Resik Apik

2. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku serta laporan atau catatan Bank Sampah Resik Apik.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Resik Apik Sronдол Kulon”, menggunakan metode interview atau wawancara, observasi, dan studi dokumen.

1. Wawancara merupakan suatu bentuk dialaog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden. Dimana responden atau orang yang diwawancarai adalah pengurus dan nasabah Bank Sampah Resik Apik. Wawancara digunakan untuk mengetahui data tentang efektivitas program Bank Sampah Resik Apik. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada pengurus serta para nasabah Bank Sampah Resik Apik.
2. Observasi. Dalam penelitian ini digunakan observasi non partisipan apabila dilihat dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data menurut Sugiyono (2011). Observasi nonpartisipan yaitu suatu observasi dimana peneliti tidak

terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan.

3. Studi dokumentasi. Teknik dokumentasi atau penelitian adalah suatu cara pengumpulan data melalui arsip, termasuk buku-buku tentang gagasan, teori, hipotesis, atau hukum yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini studi dokumentasi yang digunakan berupa data arsip atau dokumen terkait Bank Sampah Resik Apik.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono, 2013:246

1. Reduksi Data. Reduksi pada penelitian ini dilakukan secara terus menerus oleh peneliti, sehingga mampu menghasilkan catatan-catatan rinci dan inti. Data yang sudah di reduksi akan menampilkan gambaran yang lebih detail dan membantu peneliti untuk melakukan tahapan berikutnya pada proses penelitian.

2. Penyajian Data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori. Pada penelitian ini akan dilakukan penyajian data melalui uraian singkat atau mengkategorisasikan data agar lebih jelas
3. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian kualitatif diartikan sebagai sebuah temuan baru yang belum pernah didapatkan pada penelitian lain. Kesimpulan memungkinkan dapat menjawab rumusan masalah, namun juga tidak memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah. Hal ini dikarenakan karena permasalahan yang tercantum pada rumusan masalah akan mengalami perkembangan jika telah dilakukan penelitian lapangan. Nantinya akan ditemukan bukti baru yang mendukung jawaban permasalahan penelitian.

1.9.8. Kualitas Data

Moleong (2006) menjelaskan bahwa triangulasi untuk mengevaluasi keabsahan data dapat dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan metode, sumber, penyidik, dan teori

- 1) Triangulasi metode dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa metode, dan pengecekan derajat kepercayaan dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

- 2) Triangulasi dengan menggunakan sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 2001).
- 3) Triangulasi penyidik, yaitu dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat lain, atau analisis satu dengan analisis lain untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan atau kesalahan data yang dikumpulkan.
- 4) Triangulasi teori juga sangat penting untuk dijadikan dasar dalam mengevaluasi keabsahan data. Jika peneliti gagal menemukan bukti yang cukup kuat terhadap penjelasan alternatif, justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan (Moleong, 2006).

Dari penjelasan terkait keempat macam triangulasi, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber data untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu karena data yang diperoleh bisa didapatkan melalui beberapa sumber yang nantinya dapat dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik serta tidak dapat disamaratakan seperti pada penelitian kuantitatif.